KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pemerintah setujui kenaikan tunjangan DPR
Tanggal : Rabu, 16 September 2015
Surat Kabar : Suara Karya
Halaman : 7

PARLEMEN

Pemerintah Setujui Kenaikan Tunjangan DPR

JAKARTA (Suara Karya): Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Irma Suryani mengatakan, pemerintah sudah menyetujui usulan kenaikan tunjangan itu meski besaran tunjangan tidak seperti yang diusulkan DPR.

"Pemerintah sudah memberikan persetujuan akan kenaikan itu meski besarannya tidak sebesar yang diusulkan. Jadi, tidak seperti data yang ada di teman-teman media. Itu, kan, baru usulan," katanya di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pemerintah memberikan persetujuan kenaikan tunjangan minimal Rp 5 juta dan maksimal Rp 6 juta. "Nah, tapi itu terdiri dari banyak *item*. Ada tunjangan listrik, tunjangan kehormatan, dan lainnya. Jadi, bisa saja tunjangan telefon hanya naik Rp1 juta," katanya.

Dia menjelaskan, mayoritas fraksi setuju saat pengusulan kenaikan tunjangan DPR. Dia mengakui, sempat terjadi perdebatan mengenai besaran kenaikan tunjangan DPR. Meski menjadi salah satu fraksi yang menyetujui kenaikan tunjangan DPR itu, namun pihaknya akan menuruti apa kehendak dari pemerintah.

"Kami punya prinsip, jika Presiden Jokowi menolak pun, kami tidak ada soal. Kalau kini Presiden sudah menyetujuinya, pasti pemerintah sudah melakukan kajian. Seperti saat ini, kan, sudah disetujui dan besarannya tidak seperti yang diusulkan, ya, kami tidak masalah soal itu," ujarnya.

Meski sudah disetujui pemerintah melalui surat dari Menteri Keuangan, namun hal itu belum didistribusikan. "Kapannya, saya belum dapat informasi," katanya.

Ia memahami, kenaikan tunjangan DPR akan menjadi perbincangan publik di tengah sulitnya kondisi ekonomi di Tanah Air. Irma menjelaskan, usulan kenaikan tunjangan itu dilakukan pada saat ekonomi belum memburuk.

"Memang ini menjadi tidak tepat. Tapi, apa pun yang sudah diputuskan pemerintah, pasti sudah melalui kajian. Kami ingin perbaikan performa anggota dewan melalui kapasitas, kapabilitas, dan akuntabilitas," katanya.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, mengkritisi kenaikan itu. Menurut dia, kenaikan tunjangan DPR belum waktunya karena kinerja masih rendah.

Hal itu justru akan membuat gaduh di masyarakat. "Kalau kinerja kita masih sangat rendah, buat apa dipaksakan pembangunan gedung, kemudian meningkatkan tunjangan jabatan," kata Martin.

Martin menilai, kenaikan tunjangan itu hal yang wajar saja asal kinerja DPR sejalan dengan keinginan rakyat. Namun faktanya, kinerja anggota DPR masih minim. "Tapi, jika kinerja kita sejalan dengan apa yang diharapkan masyarakat, kita naikkan tunjangan pun tidak ada yang mempermasalahkan. Masih memadai tunjangan yang sekarang," ucapnya.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, anggaran tunjangan itu harus dibatalkan.

"Itu yang membuat kita sebagai masyarakat prihatin. Ini seolah tanpa beban, mengajukan fasilitas, diang-garkan, di saat mereka sendiri gagal memberikan kepercayaan kepada publik. Kerja mereka belum memberikan sumbangsih. Masil nol kinerja. Ini harus dibatalkan Menkeu meski sudah disetujui. Jangan sampai masuk RAPBN 2016," kata Lucius di gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9).

Dia melihat kenaikan tunjangan seperti tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, serta tunjangan bantuan langganan listrik dan telefon belum masuk logika. Apalagi di tengah kondisi ekonomi dalam negeri yang melamban.

"*Kayak* tunjangan kehormatan itu, kan, tunjangan sia-sia meski dia namanya anggota dewan kehormatan. Tapi, apa harus dinaikkan? Tidak ada logika yang mendukung kenaikan ini. Kondisi negara kita juga menurun," tuturnya.

Jika memang ada keinginan menaikkan tunjangan jabatan, DPR harus membuktikan dengan kinerja dulu. "Mau meyakinkan keputusan kemudian publik mau mendukung mereka, saya kira publik sudah sangat cerdas memahami kebutuhan untuk mendukung mereka," katanya.

(kar/den/rul)